

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Secara simultan variabel SDP yang terdiri dari: jumlah anggaran pendidikan, ruang kelas, rasio *guru: siswa*, *kelas: siswa*, guru berpendidikan S1/DIV, guru tersertifikasi, skor UKG, pemerataan guru UN, pemerataan guru Mapel, akreditasi sekolah unggul, kelas kondisi baik, mempengaruhi secara signifikan terhadap APK SMP di Provinsi Jawa Barat dengan daya determinasi sekira 80,6%. Sedangkan variabel SDP terhadap UN sekira 80,2%. Variabel SDP menjadi prediktor efektif terhadap APK dan UN.
- 5.1.2. Secara simultan variabel KG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap APK SMP. Model variabel kondisi geografis mampu menjelaskan pengaruh sebesar 21% terhadap APK, sehingga hipotesis 2 ditolak. Tetapi secara parsial ada sejumlah variabel yang berpengaruh signifikan yaitu jumlah kecamatan dan kondisi jalan baik. Demikian pula hipotesis 2b tidak diterima karena secara simultan variabel KG tidak berpengaruh signifikan terhadap UN.
- 5.1.3. Secara simultan variabel K.Demografis yang terdiri dari: jumlah penduduk, kepadatan perdesa, anggota keluarga, berpengaruh signifikan terhadap APK, dengan determinasi sekira 70.2% terhadap APK. Sedangkan terhadap UN sebesar 53,5%. Variabel kondisi demografi ini dapat dijadikan predictor efektif terhadap APK maupun UN.
- 5.1.4. Secara simultan variabel KE yang terdiri dari: jumlah penduduk miskin, tingkat keparahan kemiskinan, PDRB, indeks daya beli (IDB), berpengaruh signifikan terhadap APK SMP dengan determinasi sekira 75,7%. Sedangkan terhadap UN sekira 66% terhadap UN. Variabel KE dapat dijadikan prediktor efektif terhadap APK dan UN.

5.1.5. Secara simultan variabel KP yang terdiri dari: RLS penduduk, RLS laki-laki, RLS perempuan, tingkat kesehatan, IDG, berpengaruh signifikan terhadap APK SMP dengan determinasi sekira 77,9% terhadap APK dan 65,2% terhadap skor UN. Variabel ini dapat dijadikan prediktor efektif terhadap APK dan skor UN.

5.1.6. Secara simultan Kapasitas Daerah (KD) yang diformulasikan dari: SDP, K.Demografis, KG, KE, KP, berpengaruh signifikan terhadap capaian APK SMP di Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan determinasi sekira 92,6% dan 85,1% terhadap skor UN. Dengan demikian secara keseluruhan variabel yang dijadikan indikator dalam konteks penelitian ini dapat menjadi prediktor dan model yang efektif jika dihubungkan dengan upaya untuk capaian APK dan skor UN sebagai indikator kinerja sistem dan sekaligus mutu pendidikan. Artinya jika ingin mencapai skor APK dan UN yang maksimal maka kondisi-kondisi yang memiliki kontribusi positif terhadap pembentukan KD yang tinggi tersebut harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

5.2. KD untuk Jenjang SMP di Provinsi Jawa Barat

5.2.1. Indikator Pembentuk KD yang Korelatif Terhadap APK dan UN SMP

Tabel 1.5.
Indikator KD Hasil Pengujian Yang Korelatif
Terhadap APK dan UN SMP

No	Indikator KD	Prasyarat
1	Anggaran pendidikan	tinggi
2	Rasio <i>guru: siswa</i> (Jumlah guru)	tinggi
3	Rasio <i>kelas: siswa</i> (Jumlah kelas)	tinggi
4	Jumlah guru berpendidikan sarjana	tinggi
5	Jumlah guru tersertifikasi	tinggi
6	Jumlah guru berkompentensi (skor UKG)	tinggi
7	Pemerataan guru UN	tinggi
8	Pemerataan guru Mapel	tinggi
9	Akreditasi sekolah unggul	tinggi
10	Kelas kondisi baik	tinggi
11	Integritas UN	tinggi
12	Skor UN	tinggi
13	Kondisi jalan baik	tinggi
14	Keparahan kemiskinan	rendah
15	Indeks daya beli	tinggi

lik Nurulpaik, 2022

ANALISIS HUBUNGAN KAPASITAS DAERAH DENGAN KINERJA PENDIDIKAN DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

16	RLS penduduk	tinggi
17	Kualitas kesehatan	tinggi

5.2.2. Peta KD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

- 5.2.2.1. Mengacu pada capaian rerata pada periode 2015-2019, maka KD Jawa Barat cenderung naik dengan rerata sebesar 62.32% (*menengah/bawah*). Sedangkan jika mengacu pada capaian KD tahun 2019 sebesar 66,09% (*menengah/atas*). Daerah yang memiliki KD paling tinggi adalah Kota Bandung, dan paling rendah adalah Kabupaten Cianjur dan Garut.
- 5.2.2.2. Terdapat 9 daerah dengan yang capaian KD (*tinggi*) yaitu: Kota Bandung (tertinggi), Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar. 5 daerah (*menengah/atas*) yaitu: Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bekasi. 12 daerah termasuk pada katagori potensi KD (*menengah/bawah*) yaitu: Kabupaten Subang, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat, Bandung, Cirebon, Pangandaran, Tasikmalaya, Bogor, Indramayu, Sukabumi. Sedangkan 2 daerah katagori (*rendah*) yaitu: Kabupaten Cianjur dan Garut.

5.3. Implikasi dari Penelitian

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditemukan dari penelitian ini maka implikasinya adalah secara makro variabel KD sebagaimana telah diungkap dalam dan melalui penelitian ini harus mendapat perhatian lebih konsisten dari pemerintah daerah antara lain:

- 5.3.1. Dari sisi variabel SDP: Pentingnya secara konsisten meningkatkan kapasitas SDP di setiap daerah yang meliputi: konsistensi anggaran, kuantitas dan kualitas guru, persebaran guru, kompetensi guru, akreditasi sekolah, jumlah dan kondisi kelas yang baik. Karena variabel tersebut dapat berimplikasi pada kemungkinan berkurangnya daya tampung dan mutu layanan pendidikan di berbagai daerah.
- 5.3.2. Dari sisi variabel KG: Walaupun secara simultan tidak memberikan kontribusi yang meyakinkan secara statistik, namun secara parsial variabel kondisi infrastruktur jalan yang kondisinya baik di suatu daerah berpengaruh terhadap capaian positif jumlah APK, dan sebaliknya kondisi infrastruktur jalan yang

buruk di suatu daerah menyebabkan anjloknya jumlah APK. Selain secara parsial, jumlah kecamatan berpengaruh terhadap capaian APK. Artinya jika di suatu kabupaten/kota jumlah kecamatannya banyak maka dapat mendorong akselerasi APK. Pertimbangan pemekaran wilayah kecamatan dapat dijadikan isu alternatif kebijakan di Kabupaten/Kota jika ingin meningkatkan KD yang dapat mengakselerasi APK SMP.

- 5.3.3. Dari sisi variabel K.Demografi: jumlah penduduk di suatu daerah berpengaruh terhadap jumlah APK. Hal ini berimplikasi pada harus adanya kesiapan infrastruktur pendidikan yang memadai. Selain itu bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap capaian UN, yang mana “jika anggota keluarga banyak maka skor UN turun, dan sebaliknya”. Dalam konteks kebijakan bahwa pengendalian jumlah penduduk merupakan variabel penting jika dikaitkan dengan mutu pendidikan.
- 5.3.4. Dari sisi KE: Karena kondisi ekonomi dalam hal ini tingkat keparahan kemiskinan penduduk menjadi variabel pengurang yang signifikan bagi KD yang berimplikasi pada APK, maka pemerintah harus mengambil langkah yang dapat memperkuat kapasitas penduduk untuk dapat mengakses pendidikan. Maka secara teoritis hal ini memberikan implikasi pentingnya memberikan peningkatan KD melalui penyediaan bantuan pendanaan secara langsung seperti bansos, beasiswa, dan bentuk lainnya yang dapat memperkuat advokasi aksesibilitas para siswa untuk bersekolah.
- 5.3.5. Dari sisi KP: Tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah dan tingkat kesehatan berpengaruh terhadap capaian APK. Faktor keterdidikan kaum perempuan memiliki hubungan korelatif yang signifikan terhadap capaian jumlah APK di suatu daerah. Hal ini memberikan suatu konfirmasi yang kuat bahwa pentingnya perhatian terhadap keterdidikan dan pencerahan bagi kaum perempuan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa: “jika di suatu daerah rata-rata pendidikan kaum perempuan tinggi maka akan berpengaruh positif bagi peningkatan APK”. Fenomena sebaliknya bahwa RLS kaum laki-laki tidak mengkonfirmasi hubungan korelatif-signifikan terhadap kenaikan APK di suatu daerah. Artinya “tinggi rendahnya pendidikan kaum laki-lakinya tidak

mendorong terhadap akselerasi partisipasi pendidikan”. Mengapa?, tentunya temuan ini menarik dan memerlukan pendalaman lebih lanjut di luar penelitian ini. Sebaliknya,

5.4. Rekomendasi dari Penelitian

5.4.1. Rekomendasi kebijakan: Dari penelitian ini, berdasarkan pengujian atas variabel KD maka telah sedemikian rupa tergambarkan peta KD masing-masing kabupaten/kota secara lebih jelas dan terukur. Karenanya peta KD tersebut seyogianya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), untuk dapat mengambil kebijakan strategis dalam upaya peningkatan KD masing-masing secara lebih sinergi.

Dalam konteks makro Jawa Barat variabel KD yang harus mendapat fokus perhatian adalah: kompetensi guru, pemerataan guru, skor UN, RLS penduduk, akreditasi sekolah, konsistensi dukungan anggaran pendidikan, infrastruktur jalan, kemampuan daya beli, sebagai faktor penting dalam pembentukan KD yang signifikan terhadap tingkat partisipasi pendidikan.

Maka sejumlah variabel yang masih “lemah” dapat dijadikan dasar bagi titik berangkat formulasi kebijakan yang lebih sah, faktual dan obyektif. Sehingga dapat menjadi faktor lecut bagi masing-masing daerah untuk mengadvokasi berbagai kebijakan di daerahnya masing-masing sesuai dengan gambaran peta yang ada.

Berikut ini adalah rekomendasi fokus kebijakan yang dapat ditempuh oleh masing-masing daerah berdasarkan peta capaian KD: